

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengungkapan dan *corporate governance*, berikut ini adalah penjelasan beberapa penelitian-penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sekarang:

##### 1. **Anggita Pitasari dan Aditya Septiani (2014)**

Anggita Pitasari dan Aditya Septiani (2014) melakukan penelitian Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Penelitian ini berfokus pada penelitian laba rugi komprehensif karena laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh stakeholders dalam mengambil keputusan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Pengukuran variabel dependen dari penelitian ini menggunakan teknik scoring,

yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A ( *Not Applicable* ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan variabel lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota dewan komisaris, komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris.

**Perbedaan:**

- a. Untuk penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit sedangkan penelitian sekarang variabel independennya adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional.
- b. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu adalah kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif, sedangkan penelitian sekarang adalah *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

- c. Sampel perusahaan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan jasa sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan manufaktur tingkat *mandatory disclosure* yang tinggi.

**Persamaan:**

- a. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel independen adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit.
- b. Penelitian terdahulu dengan sekarang menggunakan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.
- c. Variabel dependen penelitian adalah tingkat pengungkapan wajib.

**2. Evi Gantowati dan Rosa Lenna Nugraheni (2014)**

Evi dan Rosa melakukan penelitian tentang Dampak Status Distress Keuangan dan *Struktur Corporate Governance* pada Tingkat Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Kasus Non-keuangan Perusahaan di Indonesia Selama Periode 2009-2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari status dan tata kelola perusahaan yang kesulitan struktur keuangan pada tingkat pengungkapan sukarela. Variabel independen dalam penelitian adalah papan kemerdekaan, independensi komite audit, kepemilikan institusional, frekuensi pertemuan dewan, dan frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa laporan tahunan dari 114 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011.

**Perbedaan:**

- a. Variabel indepen penelitian terdahulu adalah papan kemerdekaan, independensi komite audit, kepemilikan institusional, frekuensi pertemuan dewan, dan frekuensi pertemuan komite audit, sedangkan penelitian sekarang.
- b. Sample perusahaan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan non-keuangan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur.
- c. Populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian terdahulu pada tahun 2009-2011, sedangkan populasi penelitian sekarang paa tahun 2013 dan 2014.
- d. Penelitian terdahulu menggunakan pengungkapan sukarela, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengungkapan wajib.

**Persamaan:**

- a. Terdapat persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder yang di dapat dari BEI.
- b. Pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat persamaan yang menggunakan peran *Corporate Governance*.

**3. Novita Indrawati (2012)**

Novita Indrawati (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Adopsi Sukarela International Financial

Reporting Standards Di Indonesia”. Melakukan penelitian dengan pengujian pengaruh karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, leverage, aktivitas internasional dan reputasi auditor terhadap adopsi sukarela *international financial reporting standards* (IFRS) di Indonesia. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, yaitu sebanyak 345 perusahaan. metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adopsi IFRS secara sukarela ( $y$ ). Pengukuran variabel ini dengan memberikan point 1 jika perusahaan mengadopsi IFRS secara sukarela dan point 0 apabila tidak.
2. Ukuran perusahaan ( $X_1$ ). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.
3. Struktur kepemilikan ( $X_2$ ). Variabel ini diberi point 1 jika terdapat kepemilikan asing pada perusahaan dan point 0 jika tidak.
4. Leverage ( $X_3$ ). Untuk melihat leverage perusahaan dilihat dari DER (*debt to equity ratio*) yaitu dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas.
5. Profitabilitas ( $X_4$ ). Variabel ini dilihat dari nilai ROA (*return on total assets*) yaitu dengan membagi laba bersih dengan total aset.
6. Aktivitas Internasional ( $X_5$ ). Variabel ini diberikan point 1 jika perusahaan memiliki aktivitas luar negeri dan 0 jika tidak.

7. Reputasi Auditor ( $X_6$ ). Variabel ini akan diberikan point 1 jika diaudit oleh perusahaan yang termasuk dalam 4 besar (PWC, Deloitte, KPMG dan Erns and Young) dan point 0 jika tidak.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan logistic Regression.

**Perbedaan:**

- a. Dalam penelitian terdahulu data dalam penelitian yang akan dianalisis menggunakan logistic Regression.
- b. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, leverage, aktivitas internasional dan reputasi auditor terhadap adopsi sukarela *international financial reporting standards* (IFRS) di Indonesia, sedangkan tujuan penelitian sekarang adaah untuk menganalisis corpate governnce terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

**Persamaan:**

- a. Pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang Memiliki persamaan dalam tingkat kepatuhan pengungkapan.
- b. Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu persamaannya pada pemilihan sample menggunakan metode *purposive sampling*.

#### 4. Wulan Dwi Utami (2012)

Wulan Dwi Utami (2012) melakukan “penelitian investigasi dalam konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib kaitannya dengan mekanisme *corporate governance*. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Penelitian ini dilatarbelakangi motivasi bahwa penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS belum dilakukan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang listing (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010. Pemilihan sample dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa rerata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah sebesar 72,203%. Hal tersebut bahwa tingkat kepatuhan bahwa pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur di Indonesia belum sesuai dengan yang disyaratkan.

##### **Perbedaan:**

- a. Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan variabel independen dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu variabel independen

yang dipakai dalam penelitian terdahulu meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen. Sedangkan variabel independen pada penelitian yang akan penulis lakukan meliputi jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, jumlah anggota komite audit, sehingga variabel independen yang berbeda adalah jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit.

- b. Pada penelitian terdahulu populasinya adalah perusahaan manufaktur yang listing (terdaftar) di BEI tahun 2009 dan 2010. Sedangkan untuk penelitian yang akan penulis teliti populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2014.

**Persamaan:**

- a. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan atas melatar belakangi motivasi bahwa penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS belum dilakukan di Indonesia.
- c. Persamaan yang ketiga dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adala pemilihan sample menggunakan metode *purposive sampling*.



## 5. Wulan Prawinandi (2012)

Wulan Prawinandi (2012) melakukan pengujian pengaruh manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, pengaruh institusional terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, Pengaruh rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, pengaruh rapat komite terhadap audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, pengaruh komisaris independent terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS,. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (hypotesis testing). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang *listing*. Hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, leverage, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

### Persamaan:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti variabel dependennya merupakan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti salah satu variabel independennya merupakan komisaris independen.

**Perbedaan :**

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.

## **2.2. Landasan Teori**

Khusus untuk bagian ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini.

### **2.2.1. Agency Theory**

*Agency theory* menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah (Sofyan Syafri Harahap, 2007:546). Hubungan keagenan akan terjadi apabila satu atau lebih individu yang bertindak sebagai *principle* menggunakan jasa seorang individu yang bertindak sebagai agen untuk mengelola dan mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan. Delegasi wewenang tersebut menyebabkan adanya kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang disebut *agency problem*.

*Agency problem* seringkali terjadi pada perusahaan yang berkaitan dengan kepemilikan antara manajemen dan pemegang saham. *Agency problem* tersebut dapat diminimalisir dengan dua kategori, yaitu melalui insentif

dan *monitoring* (Zhou dan Panbunyuen, 2008 dalam Wulan, 2012). Insentif dan *monitoring* dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance*, sehingga hasilnya tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yaitu bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan (Herawati, 2008). Agar investor lebih yakin bahwa dana yang mereka investasikan tidak disalahgunakan oleh pihak manajemen, langkah yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen adalah dengan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kinerja manajemen dalam laporan keuangan. Laporan tersebut adalah bukti bahwa pertanggungjawaban manajemen atas dana yang telah diinvestasikan oleh investor.

Guna untuk memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam pengelolaan dana milik investor dan meyakinkan kepada pemegang saham bahwa manajemen tidak akan melakukan kejahatan yang dapat merugikan pemegang saham maka konsep *corporate governance* diterapkan untuk dapat diminimalisasi (Ratnasari, 2011). Teori agensi berasumsi bahwa perilaku manusia dapat memberikan prediksi atau gambaran mengenai konsekuensi logis secara tepat dan menganggap bahwa individu memiliki banyak peran dalam organisasi sehingga penggunaan teori agensi pada penelitian ini dianggap relevan (Pitasari & Septiani, 2014)

### 2.2.2. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)

Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto dan Miranti, 2009). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan atau ketentuan seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia atau oleh organisasi profesi akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

*Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas kas keluar untuk suatu bisnis.

Konsep *corporate governance* yang baik akan mendorong adanya *mandatory disclosure* yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Secara singkat *good corporate governance* merupakan seperangkat siste yan mengatur mengendalikan perusahaan untuk meraih nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Muh.Arif Effendi 2009 : 2), maka hal ini dapat mendorong terbentuknya terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, profesional, sehingga pengungkapan dalam laporan keuangan mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari

adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang.

### 2.2.3. Konvergensi IFRS

Konvergensi dalam standar akuntansi keuangan merupakan suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi yang digunakan di negara lain dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Konvergensi IFRS adalah suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. Standar ini muncul karena adanya perkembangan dan tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis internasional, maka harus diperlukan standar internasional yang berlaku di semua negara untuk mempermudah proses membaca informasi pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan di berbagai negara.

Konvergensi IFRS dideklarasikan pada tahun 2008. Deklarasi tersebut mengungkapkan bahwa pada mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan erpedoman kepada IFRS dan harus diterapkan oleh semua entitas yang *go public*. Konvergensi IFRS sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS (Chen, 2009).

Konvergensi IFRS juga bertujuan untuk terus meningkatkan informasi laporan keuangan yang diungkapkan secara *mandatory disclosure* agar dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain. Hal ini dikarenakan penyajian

laporan keuangan yang menyajikan informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **2.2.4. Struktur *Corporate Governance***

*Corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *corporate governance* mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Muh.Arif Effendi, 2009:2). Indonesia menganut sistem dua tingkat atau *two-tiers system*, yang artinya bahwa perusahaan mempunyai dua badan yang terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001).

*Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. Prinsip *corporate governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Prinsip *corporate governance* yang baik harus didasarkan pada lima hal, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Menurut (Muh.Arif Effendi, 2009:4) prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yaitu:

### 1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Prinsip *transparency* merupakan prinsip penting dalam *corporate governance* yang kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena saat pengambilan keputusan ekonomi semua pihak harus mengetahui latar belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yang akan diambil.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menuntut jawaban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan pada suatu fungsi karena dalam kata *accountability* mengandung makna *answerability*, *liability*, dan *responsibility*.

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam kegiatan operasional perusahaan harus memenuhi ketentuan yang telah ada pada undang-undang yang telah diatur oleh negara.

### 4. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip dimana kemandirian dan prinsip pertanggungjawaban saling berkaitan. Dengan adanya prinsip kemandirian maka perusahaan akan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban untuk menghindari kemungkinan terjadinya adanya kepentingan di antara berbagai pihak.

## 5. Kewajaran (Fairness)

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap *stakeholder* untuk menghindari terjadinya konflik dengan menginformasikan semua hak dan kewajiban serta kewenangan dari masing-masing *Stakeholder*.

Prawinandi, Suhardjanto dan Triatmoko (2012) menyimpulkan bahwa struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, promorsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

### a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, disebutkan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Menurut undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Pengungkapan maupun pemberhentian dewan



direksi dan dewan komisaris dilakukan melalui rapat pemegang saham. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada dewan direksi.

**b. Proporsi Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Suhardjanto dan Afni). Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, dijelaskan bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan lancar secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Butir 1-a dari peraturan pencatatan Efek No 1-A Bursa Efek Indonesia mengenai ketentuan umum pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di Bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris (Muh.Arif Effendi 2009:16).

**c. Jumlah Anggota Komite Audit**

Dalam bisnis yang kompleks dapat menjalankan fungsinya dengan baik di tengah lingkungan bisnis, maka dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. Komite audit dipandang sebagai suatu komite dalam perusahaan yang

bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin akan merugikan *stakeholders*. Berdasarkan Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Komite audit tidak hanya bertugas dalam melakukan pengawasan kinerja manajemen, tetapi juga berperan penting sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dengan tujuan untuk menghindari masalah pengendalian internal perusahaan. apabila terdapat dugaan khusus penyimpangan atau kecurangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus (Muh.Arif Effendi, 2009:36). Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, disebutkan bahwa terdapat tugas komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu :

a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana, dan komitmen jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah untuk memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap peraturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang pengawasan perusahaan yang termasuk di dalamnya sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Dengan demikian, komite audit dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan serta meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela.

#### **d. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Huafang, 2007 dalam Wulan, 2012). Semakin besar kepemilikan manajemen atas saham perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan transparansi informasi perusahaan kepada stakeholder.

Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham. Manajemen akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, karena manajemen juga akan merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil.

Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin besar prosentase kepemilikan saham oleh manajer, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib yang dilakukan perusahaan.

#### **e. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional merupakan dimana proporsi kepemilikan saham pada perusahaan oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Prisca, 2015). Kepemilikan institusional dapat diperoleh dari presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain,

baik perusahaan dalam maupun luar negeri dan pemerintah terhadap total saham perusahaan (Barako, 2007 dalam Wulan, 2012).

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan lebih meningkat. Wulan (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib, jika semakin besar prosentase kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib yang dilakukan perusahaan.

#### **2.2.5. Hubungan Jumlah Anggota Dewan Komisaris dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS.**

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberikan nasehat kepada dewan direksi. Semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja *Chief Executif Officer (CEO)* sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Anggita Pitasari dan

Anggita Pitasari dan Aditya Septiani (2014) mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya jumlah anggota komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, karena jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi sulit, sedangkan jumlah anggota

yang kecil akan menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi, 2012) sehingga tidak dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib yang lebih memadai.

#### **2.2.6. Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Tingkat**

##### **Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.**

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan semakin berkualitas sehingga akan meningkatkan transparansi pada laporan keuangan (Wardani Prawinandi, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) terdapat hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hrtoko (2012) hasil penelitiannya bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

#### **2.2.7. Hubungan Jumlah Anggota Komite Audit dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.**

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang harus dilaporkan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris.

Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan dalam perusahaan dimana terdapat independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijoyo, 2003 dalam Pitasari 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) didapatkan hasil bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, sedangkan hasil penelitian dari Anggita Pitasari menunjukkan bahwa jumlah anggota komite berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

#### **2.2.8. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dalam perusahaan yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Huafang, 2007 dalam jurnal Wulan. 2012). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen dapat menjadi lebih semangat karena termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan keinginan dari pemegang saham yang tidak lain merupakan dirinya sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

### 2.2.9. Hubungan Kepemilikan *Institutional* dengan tingkat kepatuhan

#### Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.

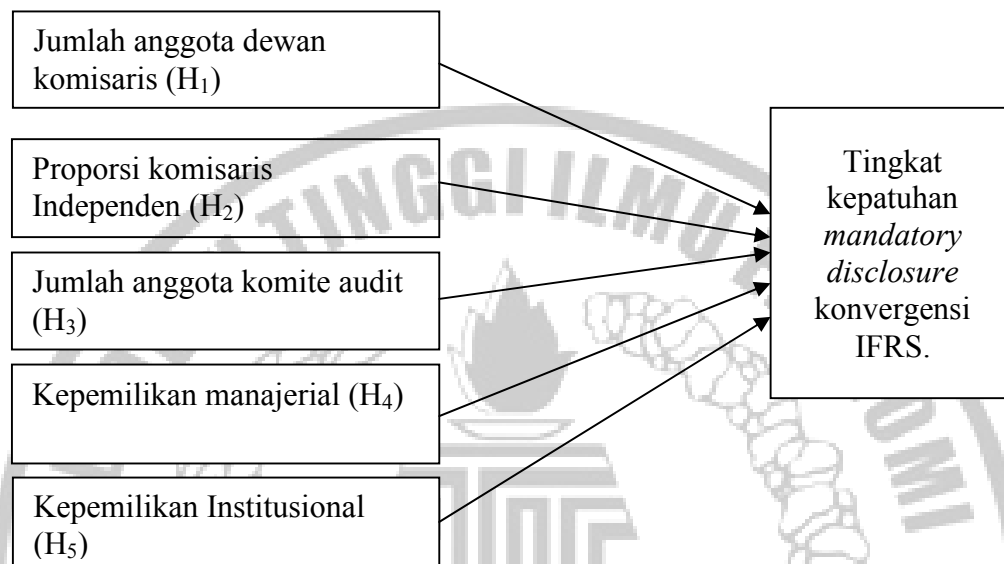
Semakin besar kepemilikan *Institutional* dalam perusahaan maka akan semakin besar pula dorongan pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga perusahaan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) didapatkan hasilnya bahwa kepemilikan *institutional* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hal tersebut karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Melalui gambaran kerangka pemikiran berikut, diharapkan variabel independen yang terdiri atas jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Di bawah ini digambarkan hubungan masing-masing variabel:



**Variabel Independen****VariabelDependen**

**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pikir pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa pengaruh variabel independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat hipotesis yang dibuktikan dalam penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub>: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- H<sub>2</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- H<sub>3</sub>: Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- H<sub>4</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS.
- H<sub>5</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

